



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

**(LKjIP)**

**2020**

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
BAGIAN ORGANISASI

# DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>2</b>
A. Umum .....	1
B. Organisasi Sekretariat Daerah .....	3
<b>Bab II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>5</b>
A. Rencana Strategis .....	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	8
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	11
B. Realisasi Anggaran .....	45
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>50</b>



# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Sekretaris Daerah

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020 dinyatakan "berhasil", karena capaiannya rata-rata diatas 93,06% dari target. Meskipun masih terdapat indikator yang tidak berhasil. Secara keseluruhan capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp34.062.038.047 telah direalisasi sebesar Rp31.549.978.004 atau 92,6% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 93,05% menunjukkan adanya efektifitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020.

# **Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang**

**2019**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. UMUM

Terselenggaranya  
Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas



## SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas

capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun





## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2019-2024 yang didukung oleh Sekretariat Daerah diantaranya :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

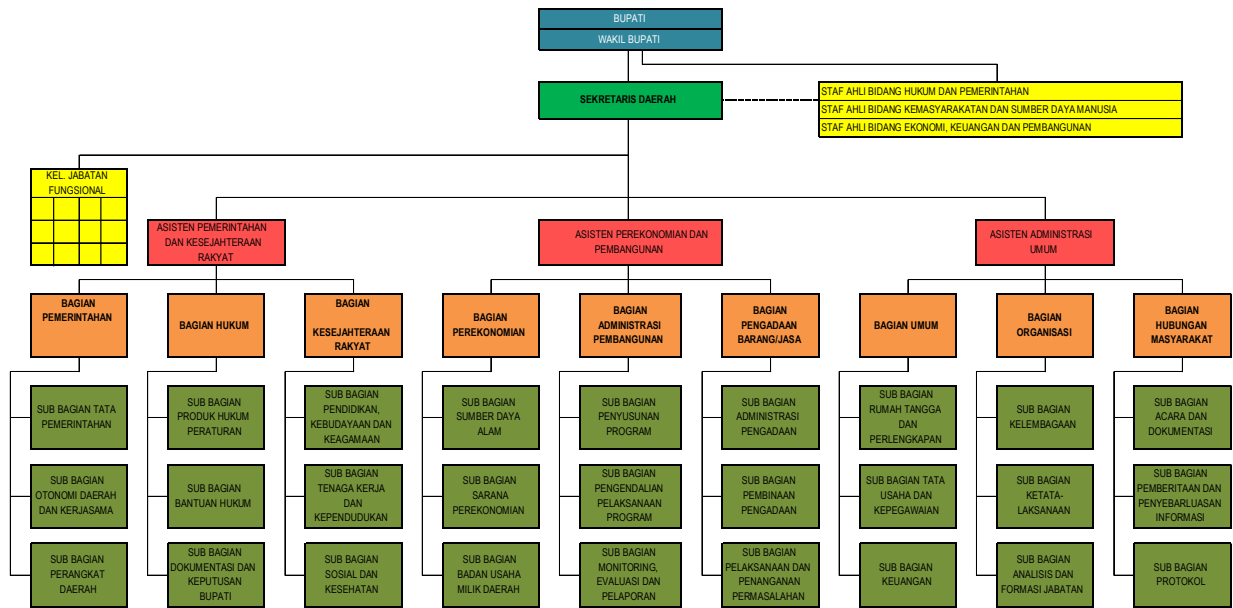
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten, 9 Bagian dan 27 Sub Bagian dengan bagan sebagai berikut :



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG



### C. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 3 Asisten yang masing-masing Asisten membawahi 3 Bagian. Fungsi dan uraian tugas masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan



## **SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG**

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bagian dilingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

### **A. Bagian Pemerintahan**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

### **B. Bagian Hukum**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.



C. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
3. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bagian dilingkup Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

A. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;



## **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

### **B. Bagian Administrasi Pembangunan**

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **C. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;



## SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

### 3. Asisten Administrasi Umum

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
2. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
4. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;

Uraian Tugas Bagian dilingkup Asisten Administrasi Umum :

#### A. Bagian Umum

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

#### B. Bagian Organisasi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;



## SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah melalui asisten administrasi umum.

### C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

### D. ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Hasil analisa isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang seperti yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang diantaranya :

1. Belum optimalnya pengkoordinasian internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan
2. Masih minimnya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah baik Pemerintahan maupun Pembangunan Daerah;
3. Belum sepenuhnya dokumen perencanaan dipedomani dalam mekanisme penganggaran program/kegiatan
4. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas



## SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

### b. CASCADING SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

#### POHON KINERJA/CASCADING PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	SARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	NAMA PROGRAM	SARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PROGRAM	TARGET	NAMA KEGIATAN	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	= (jumlah capaian kinerja / jumlah target kinerja) x 100%	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD	DKPPD dibakukan dengan cara menilai tingkat pengendalian keuangan yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama DKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah, selain itu sumber informasi perlu evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atau pemerintah. Pemerintah, anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LAPJ) maupun laporan dari masyarakat. DKPPD dilaksanakan dengan menggunakan pengalihan kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional DKPPD dan Tim Daerah DKPPD, serta pengalihan oleh pemerintah daerah (pengalihan kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Perda	3,21	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>								
				Program Fasilitas Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terwujudnya fasilitas pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	= (jumlah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi / jumlah target Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah) x 100%	24 dok							
				2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah: a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Keora c. Bidang Hukum d. Bidang Berbasis e. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%	100%	1. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	24 dok							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Nilai SAKIP	80,01A	2. Jumlah dokumen rubabumi/toponomi	1 dok dan peta	<b>BAGIAN HUKUM</b>	Program Fasilitas Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terwujudnya fasilitas pelayanan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang terfasilitasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang terfasilitasi	100%	2. Jumlah dokumen penyusunan LPPD dan LPPD yang disusun Pemerintah Daerah (LPPD) tepat waktu	2 dok		
			Program Fasilitas Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terfasitananya Pelayanan Pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	14 kali		Program Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	Terwujudnya terbina - jni kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi terpadu satu pintu	14 kec					
			Program Pembinaan Peraturan Perundang-undangan	Terbitnya produk hukum	Persentase Produk Hukum	= (jumlah Produk Hukum yang)		100%	Penyusunan Produk Hukum	Terbitnya produk hukum	a. Jumlah Perda yang diundangkan	a. 7 Perda b. 50 Perbup			





## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	= (jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n - jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1) x 100%	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	= (realisasi koordinasi ekonomi kreatif / target koordinasi ekonomi kreatif) x 100%	100%	undangan	yang diundangkan melalui LD dan BD	yang diundangkan	undangan / jumlah Produk Hukum yang diproses ) x 100%			daerah	b. Jumlah Perbu yang diundangkan c. Jumlah Laporan d. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan e. Jumlah Nashah Akademik	c. 5 Rapsoda d. 500 SK e. 5 Nashah Akademik
									Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani	= (jumlah penyelesaian kasus hukum perdata Pemerintah Daerah yang ditangani / jumlah penyelesaian kasus hukum perdata Pemerintah Daerah) x 100%	100%	fasilitasi Bantuan Hukum fasilitasi Dokumentasi dan Informasi	Tersejakutusnya sengketa perdata, TUN dan penandingan pidana Terbitnya dokumentasi produk hukum daerah dan terkoneksinya di website kab.Sampang.idh, jatmprov.go.id	a. Jumlah Peserta Penyerahan Hukum b. Jumlah Permatalahan Hukum yang dibantu c. Jumlah Kadariman yang dibina Jumlah Produk Hukum yang dilaksanakan Jumlah Buku Buletin dan Buku Lamberan Daerah, Jumlah peserta sosialisasi	a. 360 Orang b. 4 Kasus c. 225 Keluarga 360 buku dan 360 org
<b>BAGIAN ADMINISTRASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>															
Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat / jumlah pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	= (jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat / jumlah pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat) x 100%	100%					fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan fasilitasi Program Bidang Ketnagakerjaan dan Kependudukan fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan	Tenwujudnya Koordinasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan Tenwujudnya kegiatan Bidang Ketnagakerjaan dan Kependudukan Tenwujudnya Koordinasi Bidang Sosial dan Kesehatan	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan b. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi Bidang Ketnaga Kerjaan dan Kependudukan a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan b. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	a. 13 keg b. 13 keg 21 kali a. 5 keg b. 5 keg	
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>															
Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	Terlaksananya fasilitasi peningkatan ekonomi daerah	a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif b. Kontribusi BUMD terhadap PAD	= (jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan ekonomi daerah / jumlah target pelaksanaan peningkatan ekonomi daerah) x 100%			100%			Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam Koordinasi Pelayanan Sana Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi koordinasi dan monitoring pengelolaan sumber daya alam Terlaksananya koordinasi dibidang sarana perekonomian	a. Jumlah fasilitasi koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP b. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengait infas daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, ap/bisnis dan pariwisata b. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengait infas daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM,	a. 30 kali b. 12 kali a. 24 kali b. 36 kali			
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>															
Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan administratif pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah	= (jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang difasilitasi/jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan) x 100%			100%			Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelesaian problem penyusunan administrasi pembangunan sesuai peraturan yang berlaku Meningkatnya kinerja PO penyeliaan/monev/monev dalam pelaksanaan program pembangunan Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan, dilaporan yang berkualitas dan pelaksanaan kegiatan secara efektif	Jumlah buku pedoman, HPPK dan SSB yang disusun Jumlah peserta Sosialisasi a. Jumlah Dokumen Hasil Buletin yang disusun b. Jumlah Kegiatan Monitoring yang direkamkan secara simbolis	3 dik 700 org a. 1 dik b. 10 Rapsod			



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

BADAN PENYEDIAAN BARANG/JASA PEMERINTAH									
	Program Fasilitas Umum Layanan Pengadaan	Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase peningkatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik / jumlah Pustak Pengadaan Barang/Jasa x	x (jumlah Pustak Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara elektronik / jumlah Pustak Pengadaan Barang/Jasa) x	100%	Pengadaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Terdapatnya Lembar Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen Hasil Tender	300 Dok
						Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sosialisasi/pelatihan/bimbingan terkait Pengadaan Barang/Jasa	3 kali
						Pengadaan LPSP	Terdapatnya Pengadaan BU sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Sistem Informasi yang diakses	3 aplikasi
BADAN UMUM									
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemuatan layanan administratif dan jasa perkantoran	= (jumlah Program Pelayanan administratif perkantoran yang terpanahi / jumlah Program Pelayanan administratif perkantoran x 100%	100%	Peayanan administratif dan jasa perkantoran	Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran	a. Jumlah Surat Terkirim b. Cakupan Pemuatan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Menerima Jasa Perawatan d. Cakupan pemuatan jasa kebersihan e. Jumlah Pemuatan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis f. Jumlah bahan-bahan yang disediakan g. Jumlah pemuatan Kebutuhan makanan dan minuman	a. 873 Surat b. 12 Bulan c. 27 Unit d. 4 Ob e. 14 Ob f. 1055 exp g. 666ok
						Penyediaan Sarana Administrasi perkantoran	Terdapatnya Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan c. Jumlah bahan logistik dan (juru masak berikut pramusaji) untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang d. Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah f. Jumlah kebutuhan perantara untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor g. Jumlah surat-surat/blanko/formulir yang diperbanyak (otak dan fotocopy) pengandaian	a. 74 jenis b. 90 jenis c. 12 bulan d. 9 jenis e. 3 Rumah Dinas f. 38 jenis g. 24 jenis
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi persepsi ke dalam dan ke luar daerah	a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang dititik untuk menyamakan persepsi antar daerah b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang	a. 1891 kali b. 403 kali
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	= (jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik / jumlah sarana dan prasarana aparatur x 100%	100%	Pembangunan/Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor	Terwujudnya rehabilitasi dan perbaikan gedung kantor	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	a. 1 Gedung Kantor b. 1 Gedung Kantor
						Pembangunan/Rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Jabatan	Terwujudnya rehabilitasi dan perbaikan rumah jabatan dinas	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas b. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	a. 3 Rumah Dinas b. 3 Rumah Dinas
						Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operasional	a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pk; Lip (2 unit); Pool (5 unit) b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda	a. 32 Unit b. 2 Unit c. 4 Unit



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

							Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin	a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, komputer dan meja/kursi kerja pejabat	a. 36 unit b. 44 unit				
							Pengadaan Pakaian Dinas	a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDHWKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag RT beserta staf dan kelengkapan kebersihan rumah dinas	a. 50 orang b. 50 orang					
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Aparatur Pemerintah dalam kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur target x 100%	= (jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur target) x 100%	100%	Pelaksanaan bimpi/bodis/disasi seminar	Meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sotab	Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang berikutnya Bupati mengikuti Laminhas	11 orang
						Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	= (jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu / jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan) x 100%	100%	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan	a. Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triluar, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKIP b. Jumlah Laporan Akhir Tahun sebelumnya SKPD Sekretariat Daerah/Kabupaten Sampang	a. 6 Dok b. 6 Dok
							Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terwujudnya laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya	Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya	4 Dok				
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan KDHWKDH yang difasilitasi	= (jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu / jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan) x 100%	100%	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Positifikasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan informasi publik	Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2 Paket
							Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati	4 keluarga					
<b>BAGIAN ORGANISASI B</b>														
						Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbekalnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	Persentase target kinerja kelembagaan, ketidakefektifan, analisis dan format jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	= (jumlah capaian kinerja / jumlah target kinerja) x 100%	100%	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Terusunnya dokumen Pelaporan Kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	a. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas tepat waktu b. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas tepat waktu	a. 100% b. 100%
							Penetapan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan	Terusunnya Analisis Jabatan, ABK dan SKJ yang sesuai dengan standar	a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Rota Jabatan sesuai kebutuhan b. Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan c. Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru d. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%				
							Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan	Terwujudnya ketidakefektifan pemerintah yang efektif dan efisien	a. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengadopsi Kode Wilayah dengan baik dan benar b. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah/Dinas dengan baik dan benar c. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atributasi dengan baik dan benar	a. 100% b. 100% c. 100%				



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

									Penetapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah beserta	a. Jumlah Peraturan Bupati tentang/RMBR Kabupaten Sampang b. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Daerah c. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi d. OPD yang mengikuti Komposisi Butirya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur e. Jumlah Urut Kerja yang diukur WBK/BBM menuju Zona Intipitas	a. 1 Perub b. 100% c. 100 % d. 2 OPD e. 81 unit Kerja	
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang prima pada OPD Kabupaten Sampang yang disusun	Persentase dokumen KM Kabupaten Sampang yang disusun	100%		Terselenggaranya pelayanan publik yang prima pada OPD Kabupaten Sampang	a. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu b. Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai c. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	a. 100% b. 70% c. 64 unit kerja	
<b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>													
					Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya pelayanan ketumuhan, publikasi dan dokumentasi penyelenggaraan Selektoral Daerah Kabupaten Sampang	Persentase fasilitas koordinasi dan komunikasi pimpinan	= (jumlah Publikasi Kegiatan Panitia Sampang dan Seremonial Bupati/Wakil Bupati Sampang / Jumlah Kegiatan Panitia Sampang dan Seremonial serta Koordinasi Bupati/Wakil Bupati Sampang x 100%	100%	Fasilitas koordinasi pimpinan Fasilitas komunikasi pimpinan Fasilitas dokumentasi pimpinan	Terlaksananya kegiatan acara dan dokumentasi Terselenggaranya pertemuan dengan wartawan Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan komunikasi	Keptokoletoran acara pimpinan Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi Dokumentasi acara pimpinan	300 keq 12 kunjungan 200 keq

**c. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH**

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan

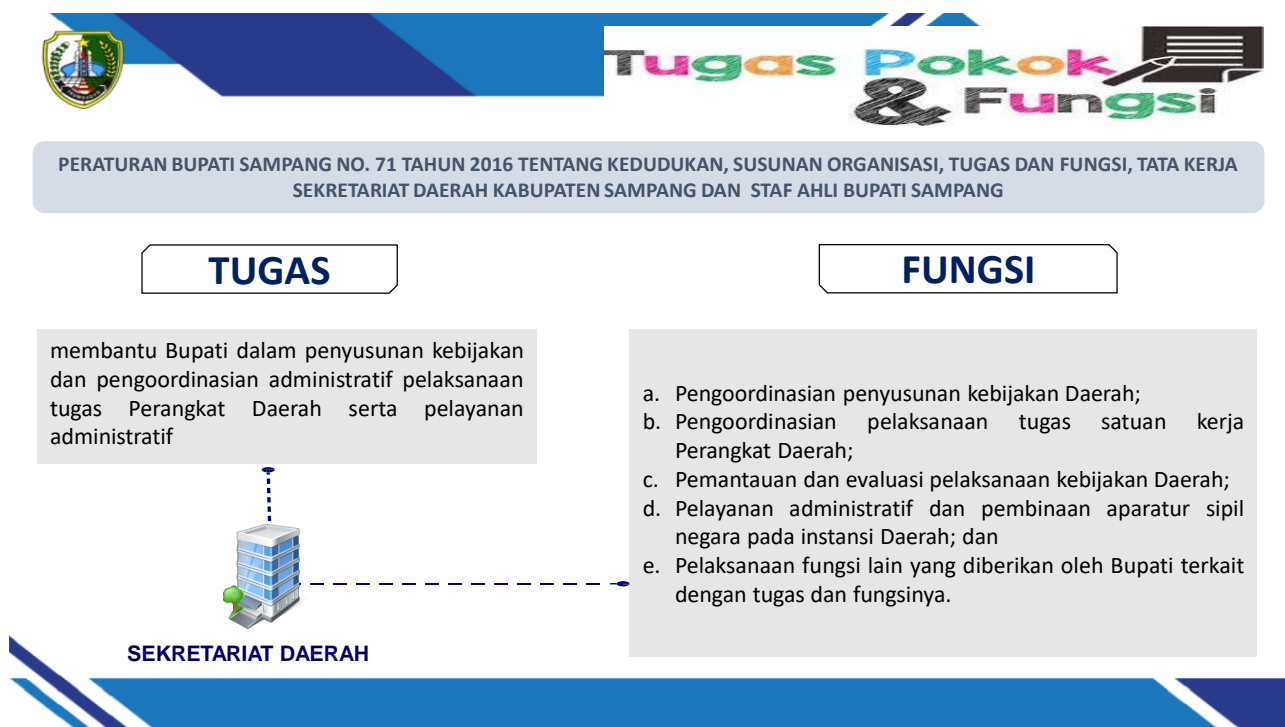


## SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

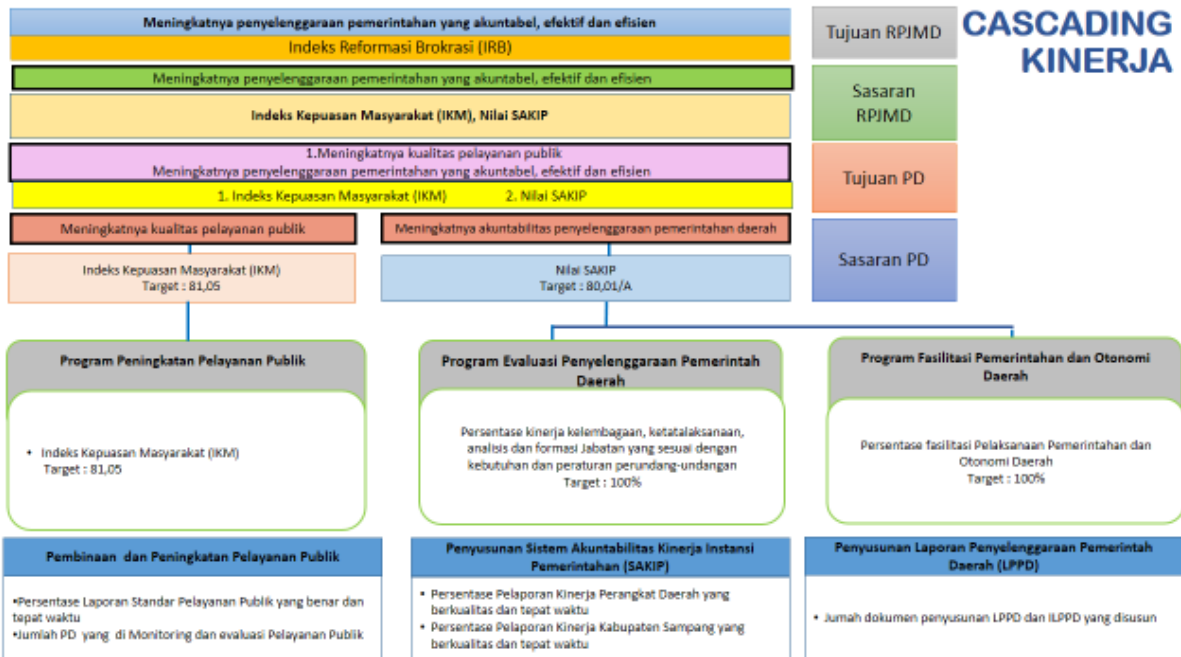
Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang :



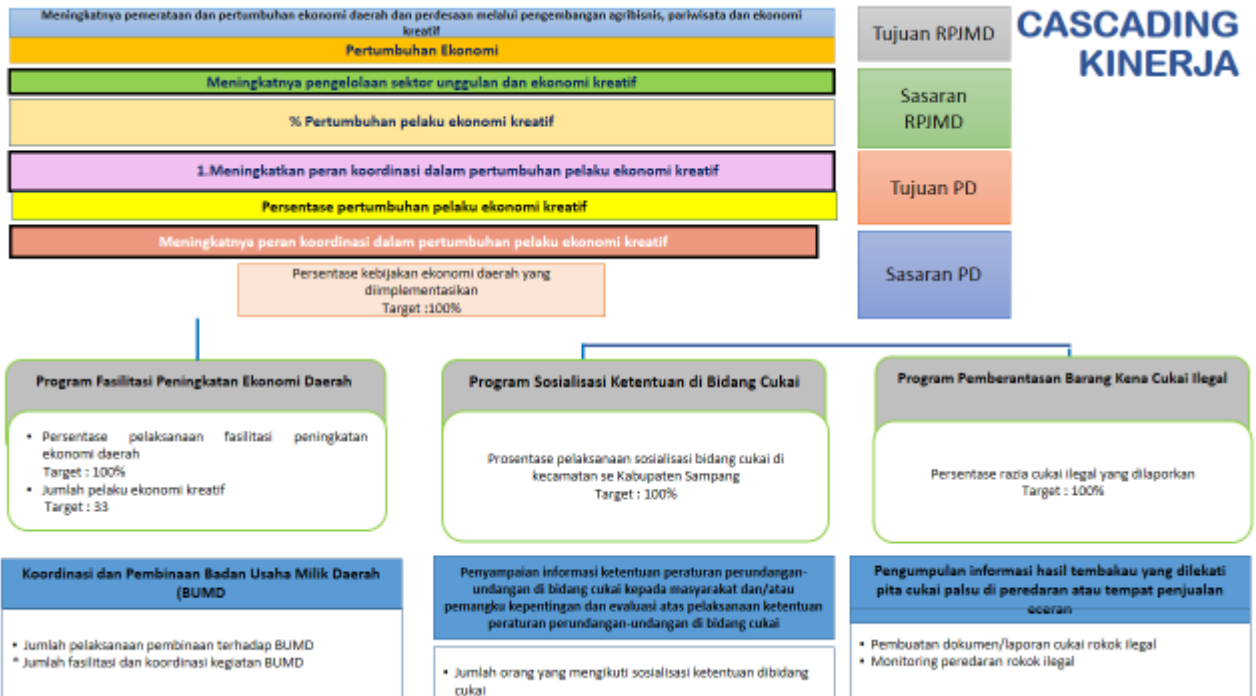


### PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

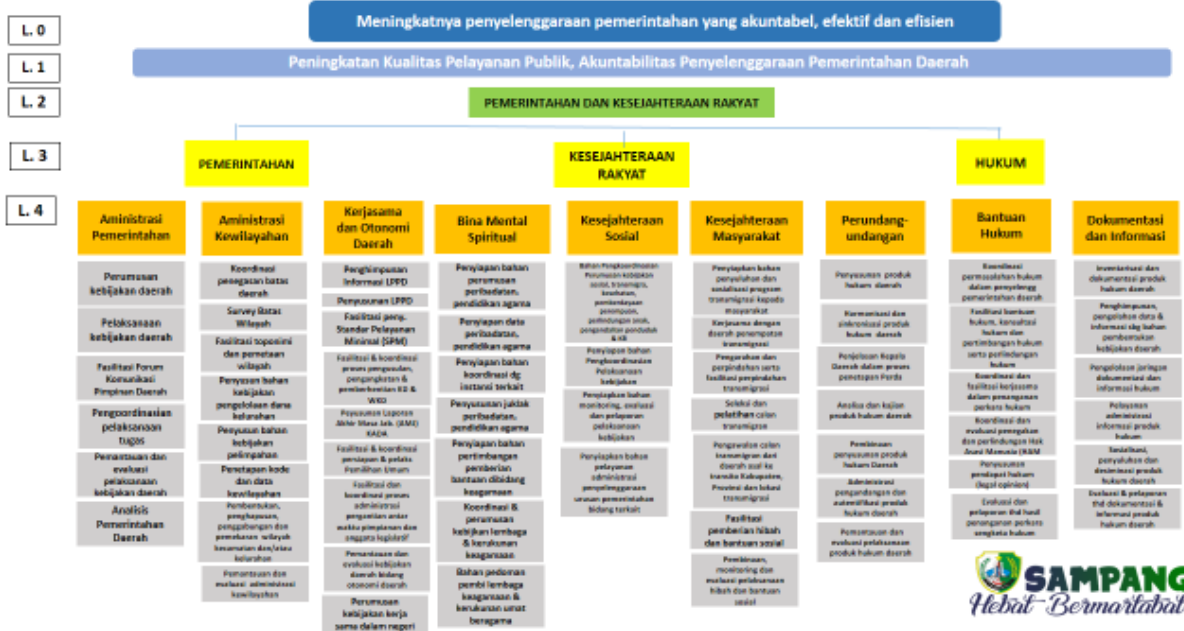




# SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG



## INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH





# SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

## INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

- L.0
- L.1
- L.2
- L.3
- L.4

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### ADMINISTRASI UMUM

	UMUM			ORGANISASI			PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN		
	Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Kesuangan	Rumah Tangga dan Perlengkapan	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelayanan Publik dan Tatatalaksana	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Protokol	Komunikasi Pimpinan	Dokumentasi Pimpinan
L.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan administrasi perkantoran</li> <li>Pemantauan dan evaluasi pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum persurutan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas</li> <li>Pengelolaan kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan, pengendalian anggaran, pertanggungjawaban anggaran</li> <li>Penyusunan &amp; pelaksanaan kebijakan</li> <li>Teknis pengelolaan administrasi</li> <li>Pemertuaan keuangan</li> <li>Pengelolaan</li> <li>Pembinaan dan fasilitasi</li> <li>Sistem pengendalian intern</li> <li>Dewan dan pelaporan fungsi pemerintahan, anggaran dan pertanggungjawaban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha rumah tangga KADA &amp; WAKADA serta SETDA</li> <li>Penyediaan akomodasi, jamaah, makanan &amp; minuman</li> <li>Penyediaan sarpras menjaga kebersihan kantor</li> <li>Pengadaan perlengkapan KADA &amp; WAKADA serta SETDA</li> <li>Pengelolaan, pengurusan, pengendalian &amp; pemeliharaan kendaraan dinas</li> <li>Penelitian sarana, menjaga kebersihan &amp; pemeliharaan rumah KADA &amp; WAKADA serta SETDA</li> <li>Penyajian sarpras utk mendukung lag KADA &amp; WAKADA serta SETDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyus. Struktur Organisasi &amp; Tata Kerja (SOTK); koordinasi penunasan tugas dan fungsi jabatan organisasi PD</li> <li>evaluasi kelembagaan PD &amp; unit pelaksana setda daerah</li> <li>Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan</li> <li>kajian akademik thd usulan peristiaan organisasi PD</li> <li>Penyus. profil kelembagaan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyus. pedoman tata naskah dinas, pakikan dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja</li> <li>Kawijakan serta bimbingan teknis di bid. keratalaksanaan dan pelayanan publik</li> <li>Sosialisai dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik</li> <li>Penghargaan &amp; pemfaktian Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>Pemfapan monitoring dan evaluasi pelayanan publik</li> <li>Kontinuitas dan fasilitasi inovasi pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi</li> <li>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten</li> <li>Penyusunan road map reformasi birokrasi</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perangkat Kinerja dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata protokol dalam rangka pengurusan tamu pemerintah daerah</li> <li>Koordinasi dan lnteraksi kepegawaian</li> <li>Pemfapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>Penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah</li> <li>Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalin hubungan dengan berbagai pihak terkait</li> <li>Perbaikan hubungan kepala pimpinan daerah</li> <li>Pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait</li> <li>Penghimpunan &amp; pengfapan informasi yang bersifat penting &amp; mendesak</li> <li>Pengfapan dan mengendalian bahan materi rapat</li> <li>Pengfapan bahan materi kebijakan</li> <li>Pengfapan media terhadap kegiatan KADA &amp; WAKADA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembukumanasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>Pemfapan notulensi rapat</li> <li>Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan KADA &amp; WAKADA</li> </ul>

## INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

- L.0
- L.1
- L.2
- L.3
- L.4

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

#### ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

#### PENGADAAN BARANG DAN JASA

	Pemfapan Program	Pengendalian Program	Evaluasi dan Pelaporan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pembinaan dan Adyokasi Pengadaan Barang dan Jasa
L.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kebijakan daerah di bidang pemfapan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan</li> <li>Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang terkait</li> <li>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait</li> <li>Pelaksanaan fungsi lain yang dibawahi oleh Administrasi Pembangunan dan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemfapan rencana kegiatan</li> <li>Pemfapan buku kebijakan pemfapan</li> <li>Pemfapan pedoman, petunjuk teknis dan juklak</li> <li>Kaidadil yang pemfapan buku, evaluasi dan kaidadil foto lain serta juklak terkait</li> <li>Sosialisai dan koordinasi</li> <li>Pemfapan program pemfapan</li> <li>Koordinasi dan fasilitasi</li> <li>Pemfapan rencana kegiatan pemfapan</li> <li>Pengendalian anggaran program pemfapan</li> <li>Pembinaan dan fasilitasi pemfapan pelaksanaan program pemfapan</li> <li>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemfapan bahan, data &amp; analisis pemfapan monitoring &amp; pelaporan prog pemfapan daerah</li> <li>Monitoring dan pelaporan pemfapan</li> <li>Pemfapan pedoman, juklak dan juklak</li> <li>Kaidadil dan fasilitasi</li> <li>Pemfapan rekomendasi dan mendaladilasi hasil pemfapan monitoring dan evaluasi program</li> <li>Pemfapan data hasil evaluasi pemfapan program</li> <li>Pemfapan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pemfapan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi paket pengadaan barang/jasa</li> <li>Buat dan analisis pasar barang/jasa</li> <li>Pemfapan strategi pengadaan barang/jasa</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan dokumen</li> <li>Pemfapan penyedia barang/jasa</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>Pemfapan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa</li> <li>Pemfapan pemfapan</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pemfapan</li> <li>Identifikasi kebutuhan pemfapan sistem informasi</li> <li>Pemfapan sistem informasi yang dibawahi oleh LPSE</li> <li>Pemfapan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pemfapan lain</li> <li>Pemfapan informasi pemfapan barang/jasa hasil pemfapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembinaan bagi para pemfapan pengadaan barang/jasa</li> <li>pemfapan manajemen pemfapan</li> <li>pemfapan hubungan dengan para pemfapan pemfapan</li> <li>pemfapan dan pemfapan tingkat pemfapan</li> <li>analisis beban kerja LPSE</li> <li>pemfapan pemfapan LPSE</li> <li>pemfapan pemfapan pemfapan LPSE</li> <li>identifikasi standar/kegiatan pemfapan secara elektronik</li> <li>pemfapan dan pemfapan kinerja</li> <li>kaidadil, pemfapan, dan lnteraksi pemfapan</li> <li>lnteraksi pemfapan pemfapan pemfapan pemfapan</li> </ul>

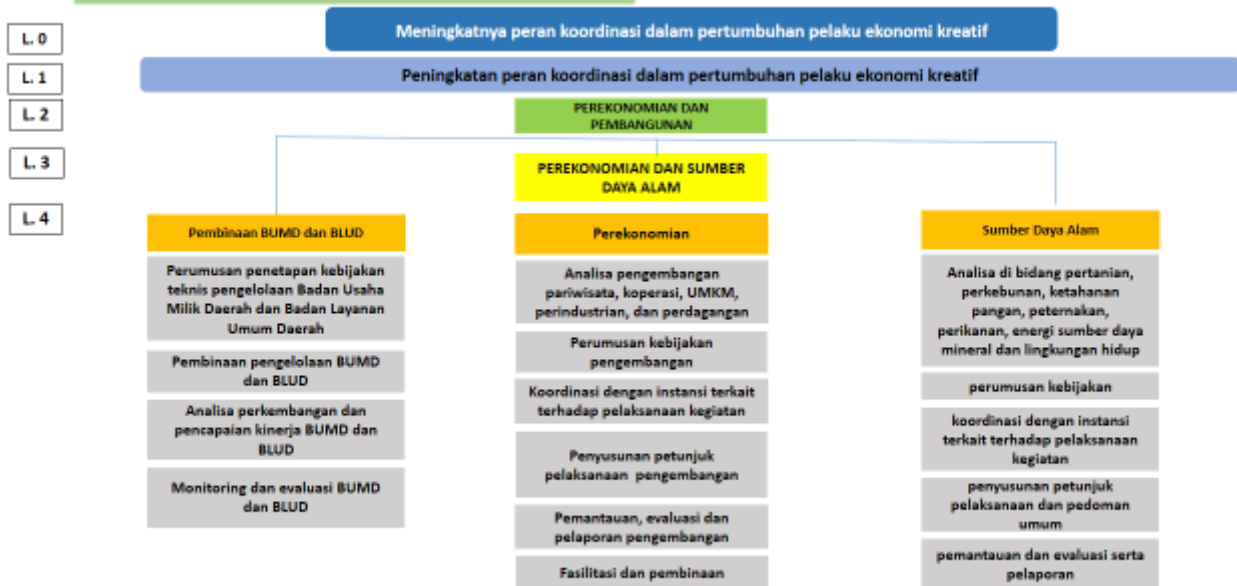






# SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

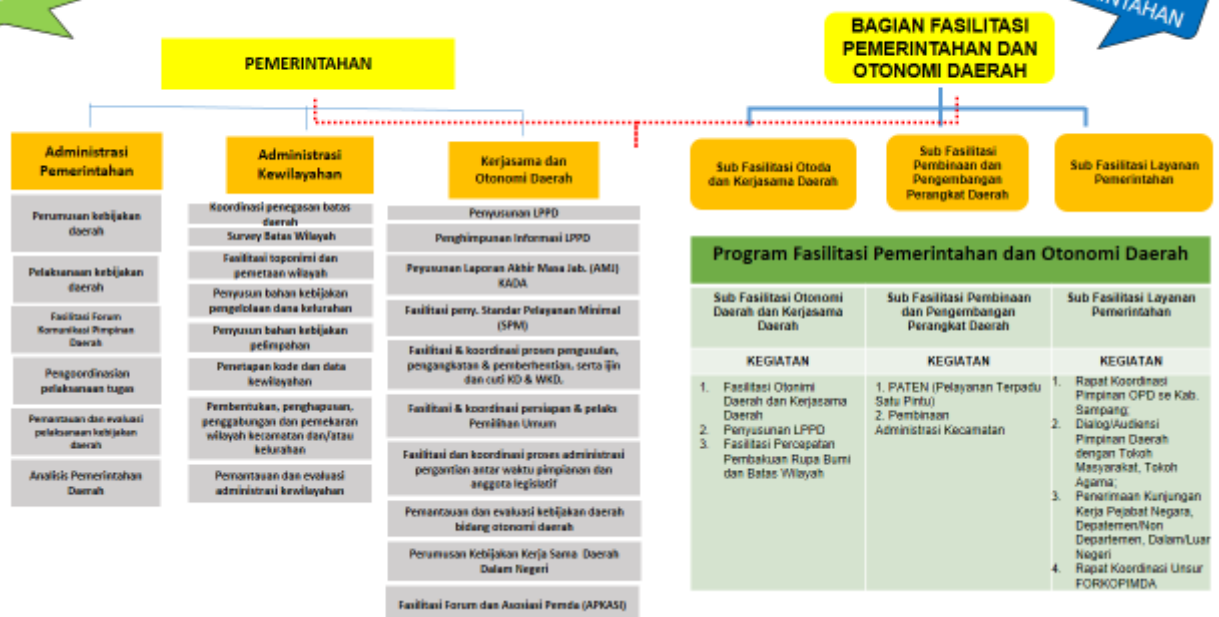
## INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

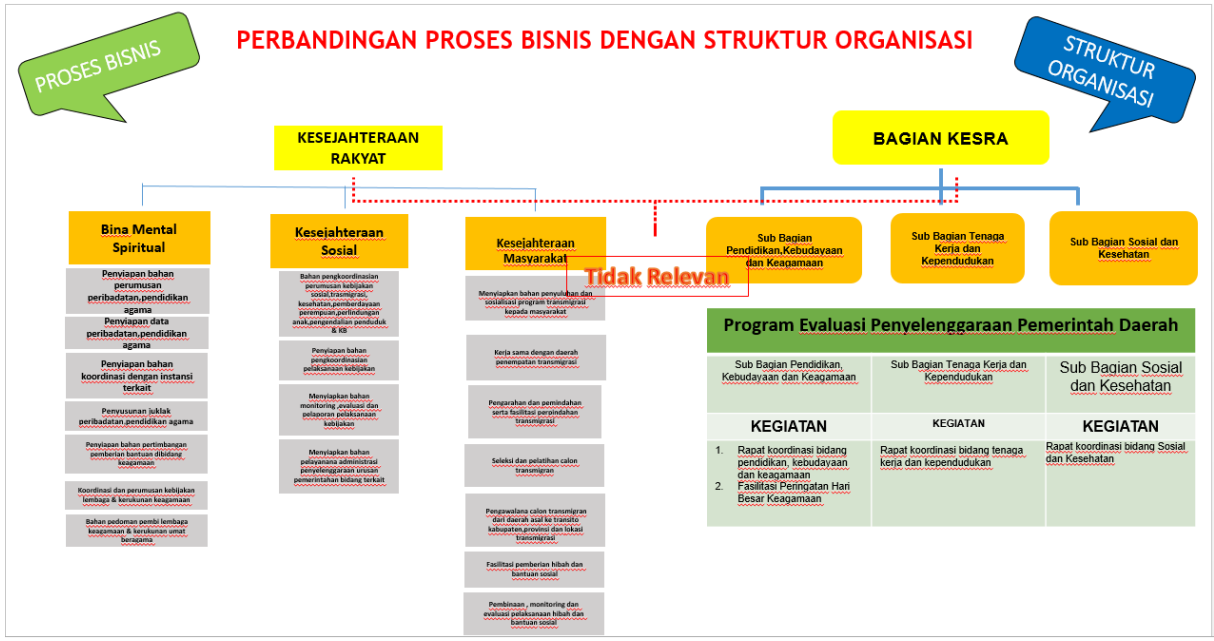
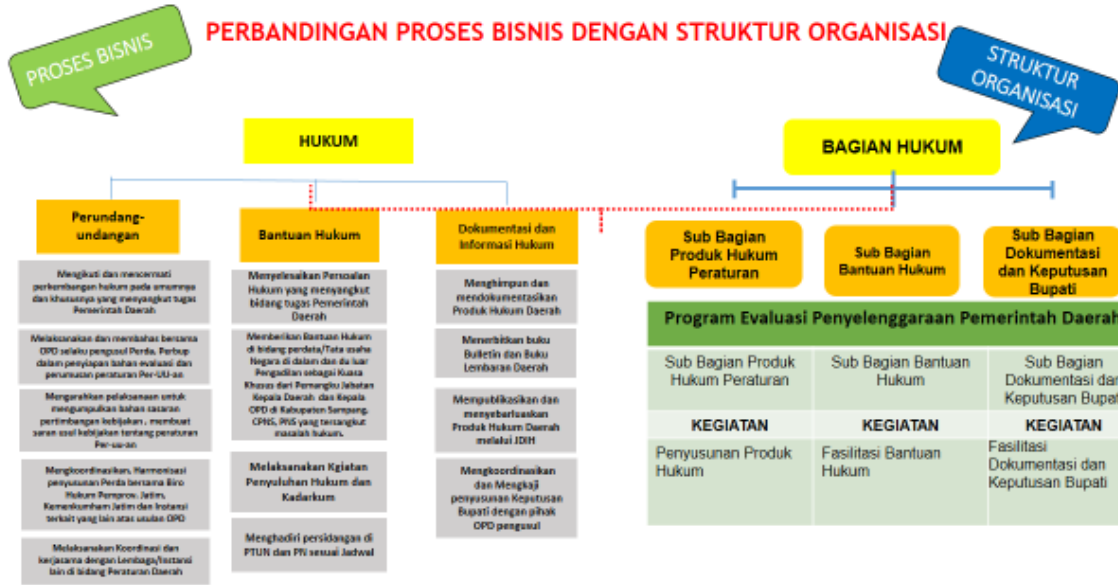


PROSES BISNIS

## PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

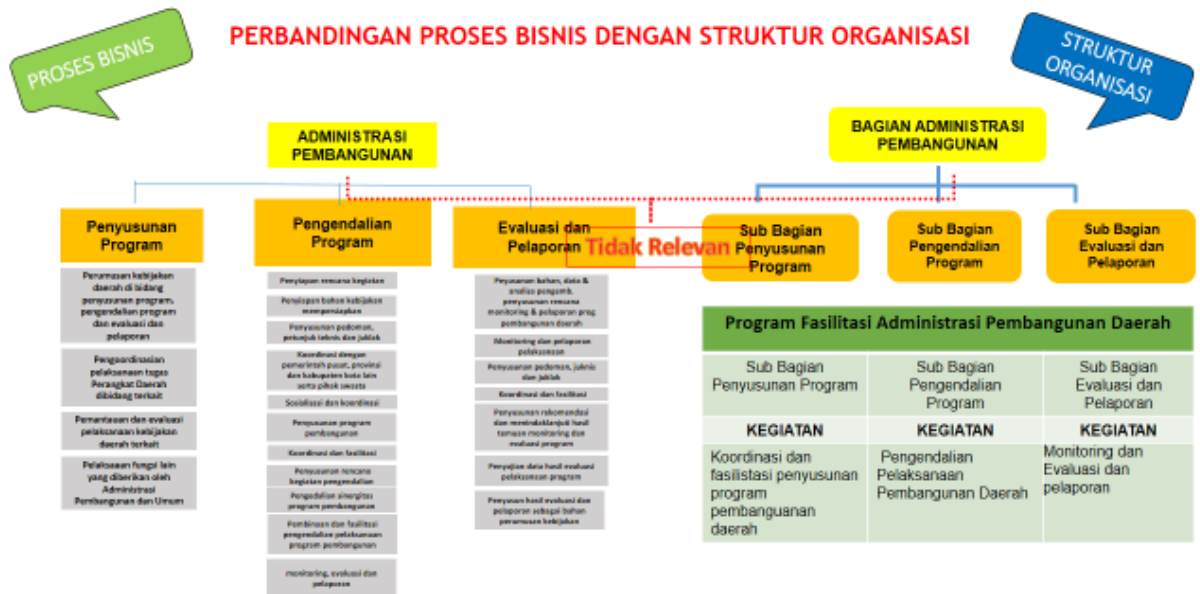
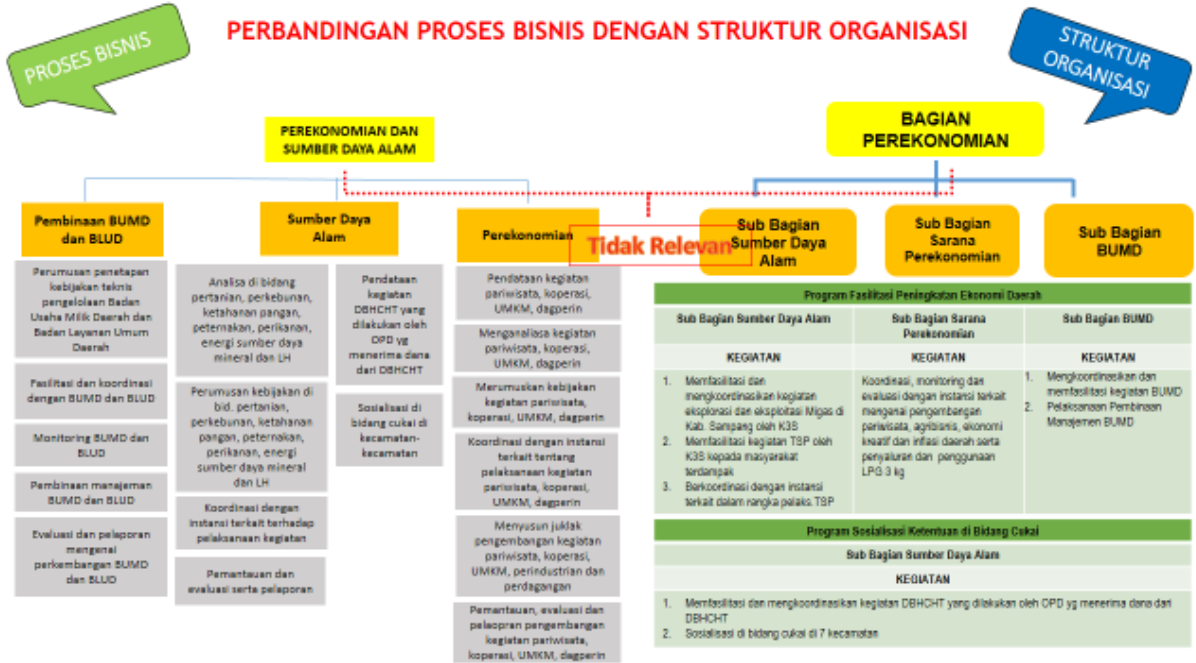
STRUKTUR PEMERINTAHAN







# SEKRETARIAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

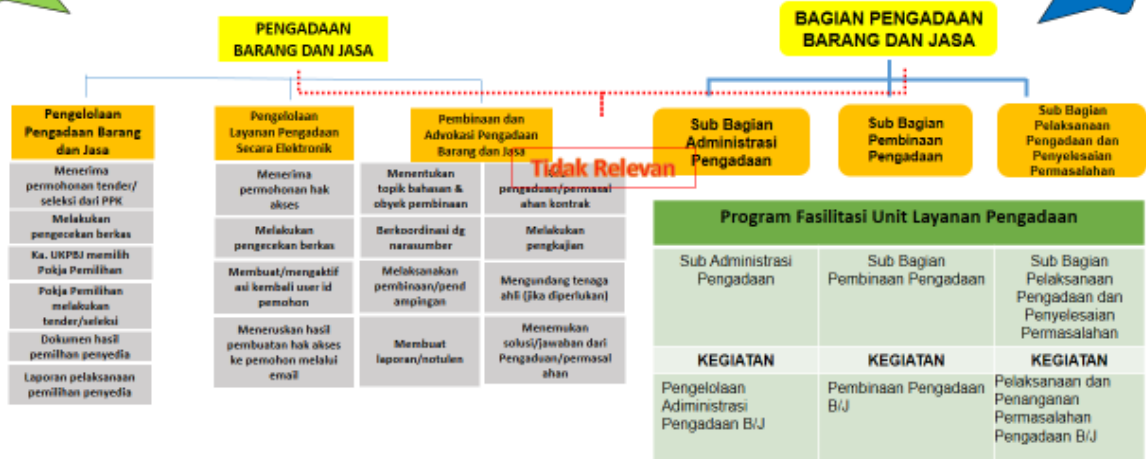




PROSES BISNIS

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

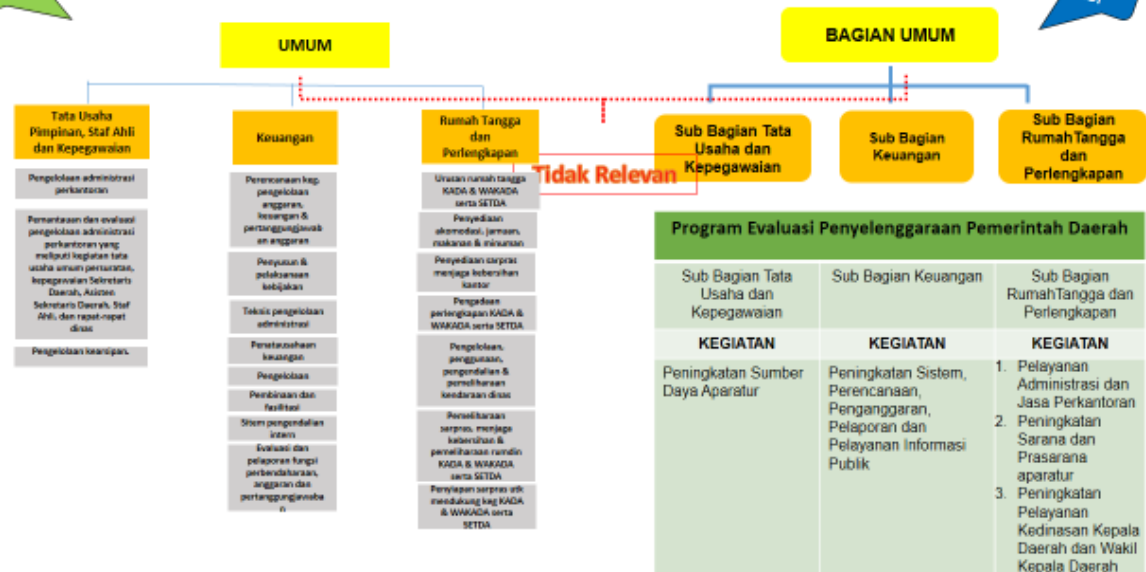
STRUKTUR ORGANISASI



PROSES BISNIS

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI



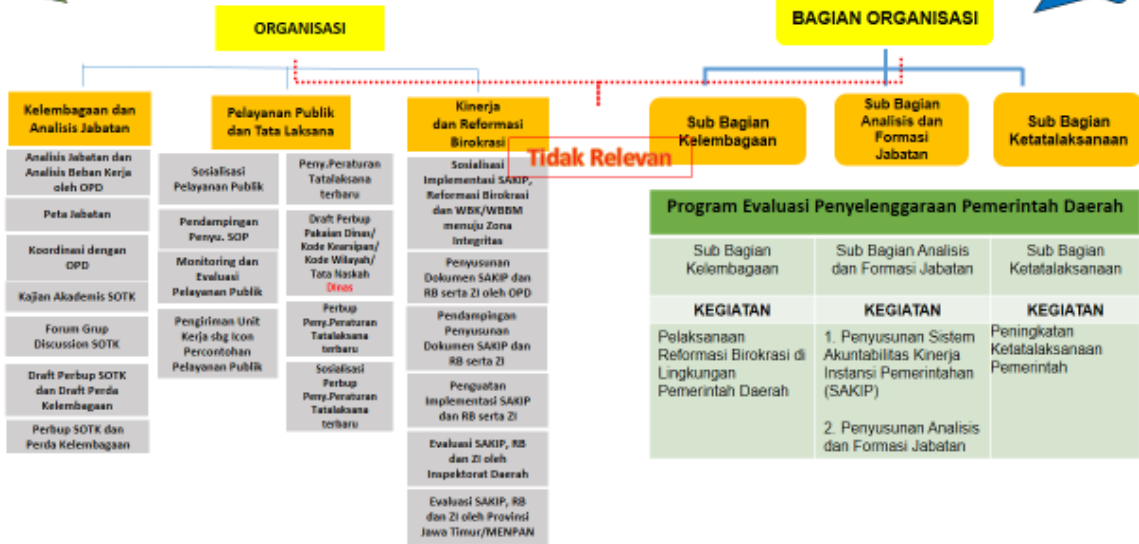


## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PROSES BISNIS

### PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

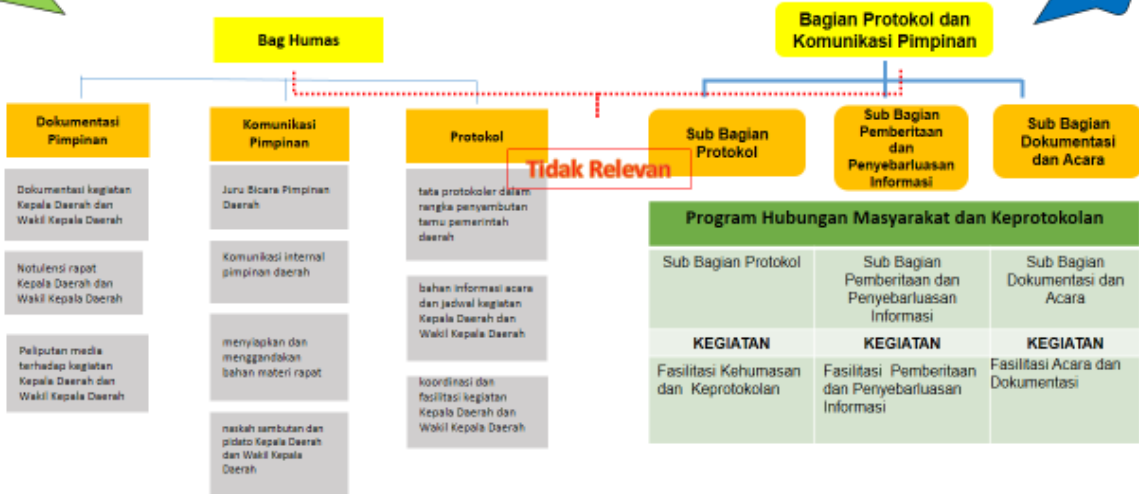
STRUKTUR ORGANISASI



PROSES BISNIS

### PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI





# BAB II

## Perencanaan Kinerja




### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 :



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EKPPD	3,23	Bagian POD
 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah : a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	100%	Semua Bagian
 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	84,01/A	Bagian Organisasi
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	Bagian Organisasi
 Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	100%	Bagian Perekonomian

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 24.132.597.700 yang digunakan untuk melaksanakan 45 kegiatan yang terangkum dalam 16 program sebagai berikut:

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	5.948.027.500
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.602.398.150
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	399.000.000
 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	40.267.000
 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2122595000
 Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1379.020.000
 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	984.457.000
 Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.294.535.000
 Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	1.119.080.500
 Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	766.916.800
 Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	216.058.550
 Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	809.534.000
 Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.130.067.650





## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	<b>161.300.000</b>
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	<b>40.549.550</b>
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	<b>118.791.000</b>
<b>Jumlah</b>		<b>24.132.597.700</b>

Rincian Anggaran per sasaran disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 3 sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut:

<b>Sasaran</b>		<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<b>23.457.026.669</b>
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<b>246.608.180</b>
	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	<b>428.962.851</b>
		<b>24.132.597.700</b>

Sumber anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang seluruhnya dari APBD.



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil” (sementara), karena rata-rata capaiannya mencapai 100%. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kabupaten Sampang target kategori A dengan nilai Minimal 80,01 dan sasaran terkait Pelayanan Publik yang belum juga berhasil mencapai target kinerja. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Rincian capaian kinerja disajikan pada Lampiran-3.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

**Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Sasaran			Realisasi	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	
1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai EKPPD	Nilai	3,31	3,21	-	-
	2 Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Barjas e. Bidang Pembangunan f. Bidang Organisasi g. Bidang Humas h. Bidang	%	100	100	100	100%

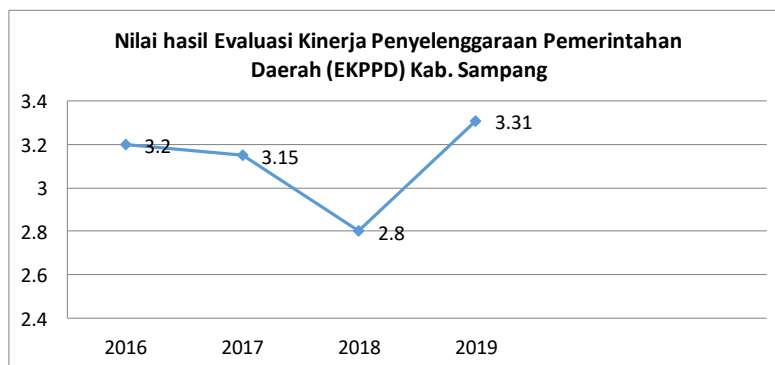


## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

	Umum					
	3 Nilai SAKIP		64,99/B	82,01 /A	66,13/B	80,6%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>						<b>90,3%</b>

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,3114 atau dengan kategori prestasi tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018. Untuk nilai EKPPD Tahun 2019 yang seharusnya ada di Tahun 2020, hingga saat ini belum ada data nilai.

Sedangkan perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh Kabupaten Sampang selama periode sebelumnya adalah sebagaimana tersaji dalam grafik III.2.



Gambar III.1 Nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sampang Tahun 2016-2019

Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2020 mencapai target dengan realisasi 100%



Sedangkan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan nilai 66,13 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2018 dan 2019**

Komponen yang dinilai		2019		2020	
		Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
<b>A</b>	30	30	23,14	30	23,59
<b>B</b>	25	25	16,79	25	17,14
<b>C</b>	15	15	9,98	15	10,23
<b>D</b>	10	10	5,83	10	5,90
<b>E</b>	20	20	9,24	20	9,28
<b>Nilai hasil evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>64,99</b>	<b>100</b>	<b>66,13</b>
<b>Tingkat akuntabilitas kinerja</b>			<b>B</b>		<b>B</b>

**Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 :**

1. Pemerintah Kabupaten Sampang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Secara umum implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang sudah baik, namun substansi belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan;
2. Secara umum perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD 2019-2024 yang dijadikan sebagai acuan kinerja pemerintah daerah sudah baik, namun belum sepenuhnya dikawal oleh perangkat daerah pengampu kinerja. Hal tersebut



- mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat dan menyelesaikan isu strategis daerah;
3. Mekanisme cascade kinerja yang telah ditetapkan tidak selalu menggambarkan proses bisnis dalam mencapai kinerja, belum sepenuhnya dapat membagi kinerja sesuai peran masing-masing jabatan serta menggambarkan program lintas sektor untuk menjawab isu strategis daerah. Beberapa indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatan dan dapat mengawal kinerja pemerintah daerah;
  4. Pemerintah Kabupaten Sampang telah mulai berupaya membangun teknologi informasi yang terintegrasi sebagai upaya untuk menerapkan manajemen kinerja organisasi, namun belum mengakomodir manajemen kinerja individu sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu;
  5. Perangkat daerah telah menyusun laporan kinerja tahunan, namun data kinerja yang dilaporkan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja yang berdampak pada pemberian *reward and punishment* perangkat daerah agar memicu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;
  6. Evaluasi internal atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah telah mulai dilakukan, namun belum secara efektif memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;
  7. Belum optimalnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

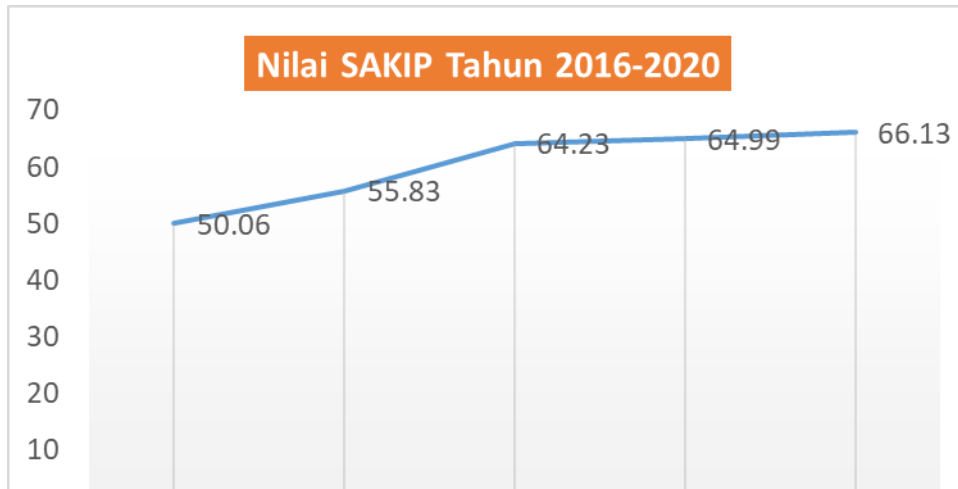
**Rekomendasi perbaikan SAKIP Tahun 2021 :**

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan khususnya pada perangkat daerah serta melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan, sesuai dengan level jabatannya dan memenuhi kriteria SMART. Merumuskan hasil reviu tersebut dalam dokumen perencanaan periode selanjutnya;



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan. Mempertimbangkan untuk merumuskan program prioritas daerah untuk menyelaraskan isu strategis daerah dengan mengoptimalkan kolaborasi antar perangkat daerah;
3. Mereviu kembali peta proses bisnis yang telah disusun dengan membangun struktur kinerja yang sesuai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini untuk memastikan kerangka logis pencapaian kinerja telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai;
4. Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang baik pada tingkatan organisasi maupun individu melalui aplikasi kinerja yang telah dibangun agar tercipta budaya kinerja yang solid pada setiap level serta mereviu indikator kinerja individu yang dibangun;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi, penilaian kinerja periodik, mekanisme *reward and punishment* serta hal lain yang diperlukan;
6. Meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah pengampu akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah;
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.



Gambar III.2 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sampang Tahun 2016-2020

**Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran			Realisasi	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,3	81,05	81,43	100,5 %





Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 81,43. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total Jumlah Nilai IKM SKPD Kabupaten Sampang dibagi dengan Jumlah SKPD Kabupaten Sampang

$$\text{Didapat : } \frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM SKPD Kab Sampang}}{\text{Jumlah Total SKPD Kab Sampang yang di IKM}} = \frac{4.071}{50} = 81,43$$

Sedangkan perkembangan nilai hasil survey kepuasan masyarakat Kabupaten Sampang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagaimana tersaji dalam gambar III.1



Gambar III.1 Perkembangan hasil survey kepuasan masyarakat Kabupaten Sampang tahun 2015-2019

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik
2. Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan
4. Program Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika



5. Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

**Kendala :**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sampang tidak mencapai target pada RPJMD dan lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena semakin kritisnya masyarakat yang disertai dengan semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh OPD Kabupaten Sampang sedangkan OPD belum melakukan perbaikan pelayanan publik

**Upaya Mengatasi :**

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.



**Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran (3) Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif**

Sasaran			Realisasi	Tahun 2019		Capaian
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Target	Realisasi	Tahun 2019
1 Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	1 Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	%	N/A	100	100	100%

Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2020 mencapai target dengan realisasi 100% dari 7 kebijakan dengan realisasi mencapai 7 rumusan kebijakan menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif antara lain melalui program :

1. Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah
2. Penataan Sosialisasi di Bidang Cukai
3. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 34.062.038.047.25,- Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

sebesar Rp. 11.929.806.062,- dan belanja langsung sebesar Rp. 22.132.231.985.25,- Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.14 Realisasi APBD Sekretariat Daerah Kab. Sampang Tahun 2020

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	11.929.806.062	11,329,544,581	94,9
Belanja Langsung	22.132.231.985.25	20,220,433,423	91,4
<b>Total APBD</b>	<b>34.062.038.047.25</b>	<b>31.549.978.004</b>	<b>93,15</b>

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.15 Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	33.483.319.179	31.002.197.563	92,5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	128,951,880	124,746,206	96,7
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku	449,766,988	423,034,235	94,1
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>34.062.038.047,25</b>	<b>31.549.978.004</b>	<b>92,6</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran " Meningkatkan kualitas pelayanan publik", dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,7%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah", dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,5%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan. Tabel III.16 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2020.



No	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	90,3	92,5	Belum efektif
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	88,9	96,7	Belum efektif
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku	100	94,1	5,9%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2020 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



# BAB IV

## Penutup

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat predikat nilai **Baik** sedangkan tujuan Meningkatkan potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI

Jabatan : Bupati Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

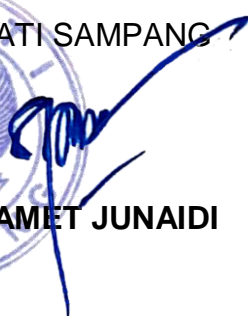
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua

BUPATI SAMPANG  
  
H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
  
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos,MM  
NIP. 19660711 1988091 001





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai EKPPD	3,23
		Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang pemerintahan dan otonomi daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	100%
		Nilai SAKIP	84,01 / A
2	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,298,560,076	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16,355,086,338	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,582,924,745	APBD

Sampang, 04 Januari 2021


  
 BUPATI SAMPANG
   

  
**H. SLAMET JUNAIDI**


  
 PJ. SEKRETARIS DAERAH
   

  
**YULADI SETIYAWAN, S.Sos,MM**
  
 NIP. 19660711 198809 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. HARUNUR RASYID, SH  
Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sampang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG



YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM  
NIP. 19660711 198809 1 001

Pihak Pertama  
Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG



H. HARUNUR RASYID, SH  
NIP. 19640311 199203 1 007



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai EKPPD	3,23
		Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang pemerintahan dan otonomi daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum	100%
		Nilai SAKIP	84,01 / A

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16,355,086,338	APBD

Sampang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG



**YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM**  
NIP. 19660711 198809 1 001

Pihak Pertama  
Plt.ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

**H. HARUNUR RASYID, SH**  
NIP. 19640311 199203 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. NURUL HADI, MM  
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIADI SETIYAWAN, S.SOS. MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sampang, 07 Januari 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG



**YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19660711 198809 1 001

Pihak Pertama  
ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG



**Drs. NURUL HADI, MM**  
NIP. 19610114 198603 1 008



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO.</b> <b>(1)</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b> <b>(2)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b> <b>(3)</b>	<b>TARGET</b> <b>(4)</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Barjas b. Bidang Pembangunan	100%
		Nilai SAKIP	84,01 / A
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,582,924,745	APBD


Sampang, 07 Januari 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG



**YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19660711 198809 1 001

Pihak Pertama  
ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG



**Drs. NURUL HADI, MM**  
NIP. 19610114 198603 1 008



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ABD.HANNAN, SH, M.SI  
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIADI SETIYAWAN, S.SOS. MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sampang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG



**YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19660711 198809 1 001

Pihak Pertama  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG



**H. ABD.HANNAN, SH, M.Si**  
NIP. 19630111 198603 1 010



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO. (1)</b>	<b>SASARAN STRATEGIS (2)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (3)</b>	<b>TARGET (4)</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Organisasi b. Bidang Humas c. Bidang Umum	100%
		Nilai SAKIP	84,01/A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,298,560,076	APBD

Sampang, 04 Januari 2021



**Pihak Kedua**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19660711 198809 1 001

**Pihak Pertama**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG**

**H. ABD, HANNAN, SH, M.Si**  
NIP. 19630111 198603 1 010





**Sampang  
Hebat Bermartabat**